

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Cetak	Banyumas Ekspres
Media Online	.....

Wilayah: Kabupaten Banyumas

Halaman 7

## Dana Peran Serta Masyarakat Dibatasi Rp75 Ribu

**PURWOKERTO** - Dengan digelontorkannya Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) sebesar Rp 1 juta per siswa per tahun dari pemerintah provinsi melengkapi BOS sebesar Rp 1,4 juta per siswa per tahun untuk SMA Negeri, maka pengumpulan dana Peran Serta Masyarakat dibatasi sebesar Rp 75 ribu per siswa.

Waka Kurikulum SMAN 1 Sokaraja, Yulius Supriyana mengatakan pembatasan tersebut tahun ini ada dalam aturan. Hanya dirinya tidak mengingat persis aturan apa yang mengatur pembatasan tersebut. Penghitungan nomi-

nal Rp 75 ribu tersebut menurutnya dari Indeks Kebutuhan Biaya Pendidikan per siswa di Jateng sebesar kurang lebih Rp 3.3 juta per anak per tahun dikurangi BOS dan BOP.

"Hasilnya kurang lebih sekitar Rp 900 ribu. Jumlah inilah yang kemudian dibagi 12 bulan dan didapat angka Rp 75 ribu per bulan per anak," katanya ketika ditemui Radarmas.

Yulius mengungkapkan sebelum adanya BOP yang digelontorkan mulai akhir 2017 tersebut, pihak sekolah bisa menghimpun dana peran serta masyarakat sampai Rp 250 ribu per siswa per

anak. Pada awal digelontorkannya BOP, dengan belum adanya aturan batasan dana peran serta masyarakat yang dihimpun dibatasi Rp 75 ribu, pihak sekolah masih menghimpun dana peran serta masyarakat di atas Rp 75 ribu. Tetapi saat ini dengan adanya aturan yang mengatur itu maka tidak bisa lagi dilakukan.

"Padahal kebutuhan antara satu sekolah dengan sekolah lainnya bisa berbeda," terang dia.

Dirinya melanjutkan yang berbeda tahun ini, Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang dibuat

sekolah terlebih dahulu harus mendapat lampu hijau dari Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah sebelum digunakan dalam menggelar pertemuan dengan komite dan orangtua wali murid. Nantinya RKAS yang diajukan sekolah akan diperiksa terlebih dahulu apakah sudah sesuai atau belum. Jika belum maka akan ada perbaikan dan sekolah tidak bisa menggelar pertemuan dengan komite dan orangtua wali murid. "Kalau tahun lalu sambil jalan. Tahun ini beda," pungkas Yulius. (yda)